

**PENGARUH STUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI  
PEGAWAI DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA**

**SKRIPSI**



**Nama : Putri Ayu Ningsi  
Nim : 222017214**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

**PENGARUH STUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI  
PEGAWAI DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Putri Ayu Ningsi  
Nim : 222017214**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ayu Ningsi  
NIM : 222017214  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Putri Ayu Ningsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Struktur Pengendalian Internal, Kompetensi  
Pegawai Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik  
Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Musi  
Rawas Utara.

Nama : Putri Ayu Ningsi

NIM : 222017214

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,



Welly, SE., M.Si.  
NIDN/NMB: 0212128102/1085022

Pembimbing II,




Anggrelia Afrida, SE., Msi  
NIDN: 0218048403

Mengetahui,  
Dekan

U. Ketua Program Studi Akuntansi



  
Dr. Betti, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri".*

*( Qs. Al-Ankabut: 6)*

*"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakanmu."*

*(QS. Fathir : 5)*

*Terucap syukur kepadamu*

*Ya Allah.....*

*Skripsi ku persembahkan kepada*

➤ *Ayahanda dan Ibunda tercinta*

➤ *Saudari-saudaraku*

➤ *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PRAKATA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Struktur Pengendalian Internal, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat, dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Welly, SE., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Anggrelia Afrida, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. serta saudara- saudara ku yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala serta pegawai/staf di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan skripsi penulis
6. Kepada seluruh keluargaku yang telah membantuku dalam berbagai hal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini terkhusus saudaraku tercinta

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang Agustus 2021

Penulis,



Putri Ayu Ningsi



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL DEPAN/COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori.....	9

1. <i>Good Government Governance</i> .....	10
a. Pengertian <i>Good Government Governance</i> .....	10
b. Indikator <i>Good Government Governance</i> .....	11
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	13
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	13
b. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	15
3. Kinerja Pemerintah Daerah.....	20
a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah.....	20
b. Tujuan Kinerja Pemerintah .....	21
c. Pengukuran Kinerja.... ..	23
B. Kerangka Pemikiran dan Penelitian Sebelumnya.....	30
C. Hipotesis .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38
D. Populasi Penelitian .....	39
E. Data Yang Diperlukan.....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	42
G. Metode Pengujian Data .....	44
H. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	45
1. Analisis Data .....	46

2. Teknik Analisis .....	47
--------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	52
1. Profil Responden .....	53
2. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	54
3. Pengujian Data .....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Palembang 2013-2017..	6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel III.2 Data Populasi Penelitian.....	33
Tabel IV.1 Profil Responden.....	46
Tabel IV.2 Pembagian Kuesioner.....	48
Tabel IV.8 Hasil Statistik Motif.....	54
Tabel IV.9 Hasil Statistik Sikap.....	55
Tabel IV.10 Hasil Statistik Konsep Diri .....	56
Tabel IV.11 Hasil Statistik Pengetahuan .....	57
Tabel IV.12 Hasil Statistik Keterampilan.....	57
Tabel IV.13 Frekuensi Variabel Kinerja Pemerintah.....	58
Tabel IV.14 Hasil Statistik Relevan.....	58
Tabel IV.15 Hasil Statistik Andal.....	59
Tabel IV.16 Hasil Statistik Dapat Dibandingkan.....	60
Tabel IV.17 Hasil Statistik Dapat Dipahami .....	60
Tabel IV.18 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	63
Tabel IV.19 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	63
Tabel IV.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	64

Tabel IV.21	Hasil Uji t.....	65
Tabel IV.22	Hasil Uji f.....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot .....	61
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Format Kuesioner
Lampiran 2	Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
Lampiran 3	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 5	Fotokopi Cap Dari Tempat Penelitian
Lampiran 6	Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an
Lampiran 7	Fotokopi Sertifikat Pelatihan SPSS
Lampiran 8	Biodata Penulis

## **ABSTRAK**

**Putri Ayu Ningsi /222017214/2021/ Pengaruh Struktur Pengendalian Internal, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu Bagaimanakah Pengaruh Stuktur Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah, dengan Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengaruh Stuktur Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 46 orang pegawai di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Software Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

**Kata Kunci: Struktur Pengendalian Internal, Kompetensi Pegawai, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kinerja Pemerintah**




**ABSTRACT**

**Putri Ayu Ningsi /222017214/2021/ The Influence of Internal Control System, Employee Competence and Application of Public Sector Accounting on the Performance of the Regional Government of Musi Rawas Utara Regency (Case Study of the Secretariat Office of the Government of North Musi Rawas Regency)/ Public Sector Accounting.**

*This research was conducted to answer the existing problems, namely How the Effect of Government Internal Control System, Employee Competence and Application of Public Sector Accounting on Government Performance, with the aim of this study to determine the Effect of Government Internal Control System, Employee Competence and Application of Public Sector Accounting on Government Performance. This research includes associative research. The sample in this study was obtained as many as 46 employees at the Government Secretariat Office of North Musi Rawas Regency. The data used is secondary data. Methods of collecting data through questionnaires and documentation. The data analysis used is quantitative analysis. The analysis technique uses descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression, coefficient of determination test, and F test (simultaneous), and t-test (partial). The data analysis technique in this study was assisted by the Software Statistical Program For Special Science (SPSS). The results of the analysis show that the Internal Control System, Employee Competence, and Application of Public Sector Accounting have a significant effect on the Performance of the Regional Government of North Musi Rawas Regency*

**Keywords: Internal Control System, Employee Competence, Implementation of Public Sector Accounting, and Government Performance.**

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A172	Putri Ayu Ningsi	/222017214	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat.

Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas dalam instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Menurut Mahsun (2016:81) definisi kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan menurut Biduri (2018: 2) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah suatu

kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Semakin banyak kompetensi yang dipertimbangkan dalam proses sumber daya manusia, maka akan semakin meningkatkan budaya organisasi (Wibowo, 2016: 271).

Struktur Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, beserta mekanisme dan ukuran – ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. (Mardi, 2016: 59).

Informasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2014 atas 184 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), BPK menemukan kasus-kasus ketidak pastian pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Struktur Akuntansi Pemerintah (SAP), pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Pada umumnya, pemerintah daerah belum menyiapkan peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya rencana pengembangan

sistem/aplikasinya serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan kerja. Dalam pemeriksaannya, BPK RI menemukan permasalahan, antara lain, pemerintah daerah belum dinilai memiliki SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, dikarenakan masih banyak SDM yang latar belakangnya bukan dari pendidikan akuntansi ( Harry, 2014).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan menemukan laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang masih tidak wajar. Kepala perwakilan BPK Sumatera Selatan mengatakan dari 18 laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa, bahkan belum mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Karena Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah kabupaten seringkali menghadapi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Apalagi, saat ini laporan keuangan berbasis akrual baru mulai diterapkan, pemerintah provinsi Sumatera Selatan harus segera menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten terkait pengelolaan keuangan daerah. Terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, tahun ini Pemprov Sumsel sudah melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Sumsel untuk mendapatkan pembekalan pengelolaan keuangan daerah.

Struktur pengendalian intern menjadi sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Struktur

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini sangat berperan penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko yang menyebabkan inefisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penyelenggaraan SPIP dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila ditandai oleh eksistensi dua aspek, yaitu aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan aspek penerapannya (*control implementation*). Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Struktur Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi

yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Km. 74 Utara, Muara Rupit, Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 31654. Visi misi Pemkab Muratara

yaitu terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional antara lain menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamatan asset daerah, dan menciptakan pelayanan prima..

**Tabel I.1**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tambahan**  
**Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (2019)**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target (2019)</b>	<b>Realisasi (2019)</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Indeks reformasi Birokrasi	40	50	125
	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat	81.19	80.14	98.71

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muratara 2021

Berdasarkan realisasi indikator kinerja tambahan sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara di dapat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong rendah dimana pada Opini BPK atas laporan keuangan daerah tahun 2019 hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan Nilai akuntabilitas kinerja hanya meraih predikat B, kemudian pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik hanya mampu mencapai 98,71 % dari indikator kinerja sasaran Indeks kepuasan masyarakat. Sehingga masih



banyak masalah yang harus di perbaiki oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari hasil LKIP pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 peran penggunaan (*utilization*) masih belum optimal sehingga dapat di lihat jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) tidak sebanding dengan permintaan publik (*public demand*), sehingga berampak terhadap Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*) dan cakupan pelayanan (*coverage*). Sehingga kepuasan (*satisfaction*) yang diukur dari jejak pendapat masyarakat masih tergolong rendah.

Pengawasan intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan survei pendahuluan atas wawancara langsung kepada Bidang Pelaksana Umum yaitu kepada Bapak Bayu Jati Kusuma, didapat hasil bahwa penerapan akuntansi sektor publik pada setiap perangkat daerah belum maksimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya pencatatan akuntansi pemerintahan yang baik seperti tidak lengkapnya bukti pendukung sebagai pelengkap pencatatan data

transaksi dan tidak semua pelaporan pencatatan data transaksi di analisis untuk di uji reabilitasnya. Akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, sehingga pelaporan pencatatan akuntansi yang baik merupakan wujud pelayanan kepada publik.

**Tabel I.2**  
**Permasalahan Kelemahan SPI Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut**  
**Pemda atas LKPD Tahun 2018**

No	Jenis Kelemahan	Jumlah Kelemahan Entitas
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	2
2	proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1
3	penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja	4
4	perencanaan tidak memadai ada	1
5	pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	1
<b>Total Kelemahan SPI</b>		<b>9</b>

Sumber : LKPD Tahun 2021

Berdasarkan permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan SPI menurut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara atas LKPD tahun 2018 bahwa total kelemahan struktur pengendalian intern ada 9, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat ada 2, proses penyusunan laporan

tidak sesuai ketentuan ada 1, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja ada 4, perencanaan tidak memadai ada 1 dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan ada 1.

Kelemahan SPI pada entitas kabupaten Musi Rawas Utara di atas tidak terlepas dari lingkungan pengendalian yang tidak optimal sehingga dengan parameter penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi yang baik serta pembentukan struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta kurangnya analisis dalam penilaian resiko yang berdampak terhadap banyaknya kelemahan SPI. Pada informasi dan komunikasi tidak mengacu kepada pasal 41 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Selain banyaknya kelemahan pada sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, informasi yang diperoleh dari Bidang Pelaksana Umum yaitu kepada Bapak Bayu Jati Kusuma menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang berlatar Akuntansi masih sangat sedikit di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ditambah lagi program/kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih kurang, sehingga kurangnya kualitas sumber daya manusia berupa pengetahuan, ketrampilan dan kurangnya perilaku yang baik akan berdampak pada kualitas dan ketidak sesuaian laporan keuangan yang dibuat.

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Nur dan Ira (2014), berdasarkan hasil maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh negatif dan struktur pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap kinerja pemerintah dikabupaten Pelalawan.

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Doni (2019), berdasarkan hasil maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan kompetensi pegawai juga memiliki pengaruh signifikansi terhadap kinerja pemerintah dikabupaten Pelalawan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Noval (2015), berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, struktur pengendalian intern pemerintah dan peran manajer keuangan dari kinerja manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali

mengenai penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Struktur Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pengaruh Struktur Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Struktur Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang telah

diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya berkaitan dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan kinerja pemerintah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian mahasiswa dosen untuk penulisan berikutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Firman Sampurna, 2018. *BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengendalian Internal Kementrian/Lembaga*. Antaranews, Jakarta.  
<https://m.antarane.ws.com/berita/631918/bpk-soroti-lemahnya-sistem-pengendalian-internal-kementrianlembaga>
- Anwar Sanusi, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Selemba Empat.
- Harobin Mustofa, 2018. *BPK Deadline Laporan Keuangan Pemkot Palembang*. Beritapagi.com. Palembang. <http://beritapagi.co.id/2018/01/22/bpk-deadline-laporan-keuangan-pemkot-palembang.html>
- Indonesia Corruption Watch, 2019. *Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Rendah*. Antikorupsi.org. Jakarta. <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/komitmen-pemberantasan-korupsi-pemerintah-daerah>
- Mahsun Mohamad, 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2017. *Accounting Informasi Systems*. Fourteenth Edition. Arizona State: Pearson.
- McShane S.L. dan Glinow M.A.V., 2008. *Organizational Behavior*. Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Muhammad Masykur, 2019. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemkot Cilegon Level 3*. Kabaranten.com, Banten. <https://www.kabar-banten.com/sistem-pengendalian-intern-pemerintah-pemkot-cilegon-level-3/>
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Selemba Empat.
- Noval Hadi Praja, 2015. *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*. Jurnal Fekom Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
- Nur Azlina dan Ira Amelia, 2014. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12, No. 2 Desember 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Siti Rosida, 2017. *Pengendalian Internal Masih Buruk*. Jabarekspres.com, Jakarta.  
<http://jabarekspres.com/2017/pengendalian-internal-masih-buruk/amp/>

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:  
Alfabeta.

Uma Sekaran, 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat.